



Menyulam Potensi: Rancangan Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Era Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Irma Idris¹, Insyirah Fatimah Hidayat², Aliya Musyrifah Anas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Idrisi21b@student.unhas.ac.id

ABSTRAK

Transformasi teknologi di dunia pendidikan salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang terlihat dari strategi-strategi pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek). Kemendikbudristek sejak 2019 telah menjalankan berbagai kebijakan dan program dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi, salah satunya adalah program Pelatihan Mandiri pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terpadu bagi guru. Namun, manfaat dan peluang yang diberikan tidak seluruhnya dapat dirasakan para guru honorer, terutama bagi guru honorer di daerah-daerah terpencil dan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas guru honorer di daerah berpenduduk miskin dalam menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dan untuk mengetahui skema kebijakan pemberdayaan guru honorer dalam meningkatkan akses CASN di daerah miskin di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan sumber internet, serta data sekunder berupa hasil wawancara. Digitalisasi pendidikan bagi guru honorer di daerah berpenduduk miskin menghadapi tantangan keterbatasan akses internet, biaya tambahan, infrastruktur yang buruk, dan manfaat sertifikasi pelatihan digital lebih dirasakan oleh guru ASN sehingga menciptakan kesenjangan karier. Skema kebijakan yang dirancang yakni perlunya revitalisasi kebijakan Kurikulum Merdeka untuk guru honorer di daerah miskin dengan penyediaan akses yang lebih inklusif terhadap modul Pelatihan Mandiri, penyesuaian kewajiban guru honorer, serta prioritas bantuan kuota internet.

Kata Kunci : Digitalisasi, Guru Honorer, Merdeka Mengajar, Pendidikan.

ABSTRACT

Technological transformation in the world of education is one of the efforts to realize the Golden Indonesia Vision 2045, which can be seen from the development strategies for education and science and technology (iptek). Since 2019, the Ministry of Education and Culture has implemented various policies and programs in realizing technology-based quality education, one of which is the Independent Training program on the Merdeka Teaching Platform (PMM) which is oriented towards empowering and improving integrated competencies for teachers. However, the benefits and opportunities provided are not entirely felt by honorary teachers, especially for honorary teachers in remote and poor areas. This research aims to find out the reality of honorary teachers in poor areas in adjusting to the digital transformation era and to find out the policy scheme for empowering honorary teachers in increasing CASN access in poor areas in the digital transformation era. The method used is juridical-empirical with secondary data in the form of laws and regulations, scientific articles, and internet sources, as well as secondary data in the form of

interviews. Digitalization of education for honorary teachers in poor areas faces challenges of limited internet access, additional costs, and poor infrastructure, and the benefits of digital training certification are felt more by ASN teachers, creating a career gap. The policy scheme designed is the need to revitalize the Merdeka Curriculum policy for honorary teachers in poor areas by providing more inclusive access to the Independent Training module, adjusting the obligations of honorary teachers, and prioritizing internet quota assistance.

Keywords: *Digitalization, Education, Honorary Teachers, Merdeka Mengajar.*

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi dalam pendidikan merupakan alat dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan salah satu upaya dalam melaksanakan amanat konstitusi pada Pasal 31 ayat (1) bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*" dan Pasal 28C ayat (1) bahwa "*Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...*". Transformasi teknologi dalam pendidikan memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan akses pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik, efisien, interaktif, relevan, dinamis, dan sesuai kebutuhan pelajar sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran (Hidayatullah dkk., 2023).

Contoh halnya adalah Finlandia, sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik didunia, teknologi menjadi salah satu sarana yang paling berpengaruh. Perangkat keras dan lunak terbaru, seperti laptop, tablet, dan akses internet, tersedia di sekolah-sekolah Finlandia. Hasilnya, kemampuan digital siswa meningkat, akses ke sumber daya pendidikan meningkat, dan pembelajaran yang didukung teknologi pun difasilitasi. (Aryawan, 2024). Walaupun pemerataan teknologi pendidikan juga menjadi salah satu tantangan di Finlandia, namun jika dibandingkan dengan Indonesia yang berfokus pada mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, sementara Finlandia berfokus pada pengembangan literasi digital dan keamanan data. Hal tersebut kemudian menjadi gambaran bahwa akses dan kualitas pendidikan di Finlandia sudah merata, sehingga fokusnya berpindah untuk pengembangan teknologi pada proses belajar mengajar (Kundryanti dkk., 2024).

Transformasi teknologi di dunia pendidikan juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari strategi-strategi pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek) yang dicanangkan dalam pilar Visi Indonesia Emas 2045, seperti peningkatan kualitas manusia dengan layanan pendidikan yang semakin tinggi dan merata, peningkatan profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran dan peningkatan

kemampuan penguasaan serta kemandirian iptek di bidang pendidikan (Kementerian PPN, 2019). Oleh karenanya, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus melakukan transformasi teknologi dalam pendidikan demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Pada Asia Tenggara, Singapura menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik. Digitalisasi pendidikan yang mereka terapkan salah satunya adalah ‘ClassIn Lifelong Learning Ecosystem (LLE)’ berformat hibrida yang pertama di Singapura. Platform ini merupakan solusi yang menyeluruh, multifaset, dan terpadu yang membantu organisasi, bisnis, dan pendidik dalam menyediakan program pembelajaran seumur hidup terbaik di Singapura. Khususnya bagi para pendidik, terdapat program TeacherIn dalam platform tersebut. TeacherIn memfasilitasi berbagi dan promosi sumber pembelajaran daring oleh para pendidik. (Antara News, 2024).

Sementara di Malaysia sebagai salah satu negara serumpun dan memiliki budaya yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, rupanya tingkat pendidikannya lebih maju dari Indonesia, terkhusus dalam hal digitalisasi. Di bawah program BestariNet, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menawarkan sistem pembelajaran berbasis web bernama "Frog VLE" yang mengintegrasikan ide-ide pendidikan tradisional untuk meniru pembelajaran dunia nyata. Dalam Frog VLE, misalnya, guru dapat memberikan tugas, ujian, dan nilai secara virtual, siswa dapat mengumpulkan tugas dan melihat nilai mereka, orang tua dapat berkomunikasi dengan guru dan staf administrasi sekolah untuk mengatur kalender sekolah dan melihat pemberitahuan secara daring, dan guru dapat dengan mudah membuat materi pengajaran yang menarik yang mengakomodasi berbagai gaya belajar. Selain itu, platform ini menghubungkan guru di seluruh negeri, yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan berbagi ide dan materi pengajaran. (Kamarudin & Ahmad, 2024).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sejak 2019 telah menjalankan berbagai kebijakan dan program dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi, salah satunya adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM). PMM merupakan platform digital yang diperuntukkan kepada guru dan kepala sekolah dalam menunjang kegiatan mengajar dan berkarya yang diakses secara daring. PMM juga berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terpadu bagi guru (Wang dkk.,

2019). Salah satu produk peningkatan kompetensi guru dalam PMM ialah Pelatihan Mandiri (Pusat Informasi Guru, 2022).

Pelatihan Mandiri dapat diakses oleh seluruh guru, tidak memandang status, baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sebagai honorer, dan kepala sekolah yang memiliki akses masuk ke PMM. Pelatihan Mandiri terdiri atas beragam topik yang terbagi kedalam beberapa modul, kemudian modul tersebut terdiri atas beberapa materi dan disertai aksi nyata yang harus diselesaikan guru agar mendapatkan sertifikat sebagai output dari Pelatihan Mandiri. Sertifikat Pelatihan Mandiri merupakan bukti kompetensi dan salah satu penunjang dalam pengembangan karier bagi guru. Sertifikat Pelatihan Mandiri dapat digunakan untuk meningkatkan jabatan atau pangkat di instansi tempat guru bekerja hingga mendaftar pada beasiswa atau pelatihan lanjutan lainnya.

Namun, manfaat dan peluang yang diberikan Sertifikat Pelatihan Mandiri tidak seluruhnya dapat dirasakan para guru honorer. Kebutuhan akan penggunaan PMM yang masif tidak dibarengi dengan pemberian kuota oleh pemerintah. Hal ini sangatlah berdampak kepada para guru honorer karena gaji yang didapatkan sangat minim sehingga tidak mampu untuk membeli kuota internet, padahal kuota internet sangat diperlukan dalam proses kegiatan Pelatihan Mandiri sebagai pengembangan karier guru honorer di era transformasi teknologi (SMPN 1 Kurun, 2023).

Selain membutuhkan kuota internet, penggunaan PMM juga menjadi kendala bagi guru honorer terutama di daerah-daerah dengan akses internet yang kurang memadai, salah satunya Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten dengan penduduk termiskin kedua dibawah Kabupaten Pangkep dengan persentase sebesar 13% (Darmawan, 2023). Permasalahan- permasalahan tersebut seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak terlalu penting untuk diselesaikan. Namun, bagi para guru honorer, masalah-masalah ini sangatlah berdampak pada kegiatan pengembangan karier yang mereka lakukan. Pada "Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan", salah satu alokasi dana yang perlu dikeluarkan menggunakan Dana Bos adalah pembiayaan internet (Permendikbudristek, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2023) membahas mengenai guru

SD di Kota Serang yang memiliki pemahaman yang baik terkait penggunaan Platform Merdeka Mengajar namun pelaksanaan yang kurang optimal karena iklim lingkungan sekolah yang tidak mendukung serta tugas-tugas tambahan di luar tugas pokok guru yang juga menghambat dalam maksimalnya pelaksanaan program tersebut. Kemudian, penelitian oleh Purnama & Suyanta (2025) menemukan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan PMM di SMPN 1 Bangli yang merupakan daerah 3T mengalami kesulitan terutama pada beban kerja guru yang tidak sesuai dengan pendapatan serta infrastruktur yang terbatas untuk mengaksessnya.

Berdasar pada pembahasan diatas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang bertujuan untuk mengetahui realitas guru honorer di daerah berpenduduk miskin dalam menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dan untuk mengetahui skema kebijakan pemberdayaan guru honorer dalam meningkatkan akses CASN di daerah miskin di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Metode ini berdasar pada teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang relevan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji sistem norma yang berlaku dan mengkaji reaksi dan interaksi dalam bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Data primer yang digunakan adalah berupa peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, jurnal dan makalah serta sumber dari internet sebagai bahan referensi berupa berita, pendapat dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara guru honorer di Kota Jeneponto sebagai bentuk pengamatan di lapangan untuk mengkaji reaksi dan interaksi dalam bekerjanya norma di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Guru Honorer di Daerah Berpenduduk Miskin dalam Menyesuaikan Diri dengan Era Transformasi Digital

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU 14/2005, Profesional yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tepatnya pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kewajiban ini diadakan adalah untuk mencapai tujuan dibentuknya UU 14/2005, yaitu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi dan memajukan profesi serta karir guru dan dosen.

Digitalisasi di Indonesia terus mengalami perkembangan di bidang kehidupan manusia baik dari sektor ekonomi, kesehatan, pemerintahan, sosial dan juga pendidikan (Sugeng, 2024). Saat ini, teknologi telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan (Universitas PGRI Yogyakarta, tanpa tahun). Terbentuknya pemahaman teknologi dalam lingkup tenaga pendidik merupakan kunci untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Proses digitalisasi di bidang pendidikan memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan efisien, serta memfasilitasi pengembangan keterampilan profesional guru melalui pelatihan berbasis teknologi (Alfaridzi, 2024). Salah satu bentuk proses adaptasi perkembangan teknologi di bidang pendidikan ialah dengan peralihan metode ujian sertifikasi guru dari manual ke sistem daring. Sertifikasi guru merupakan salah satu model peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas guru dalam dunia pendidikan. Investasi dalam teknologi dan komunikasi (TIK) telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Patoni, 2024). Proses

adaptasi ini mendorong guru untuk menyesuaikan diri agar dapat memperoleh peningkatan kompetensi dengan tujuan perbaikan kesejahteraan guru. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi pendidik yang lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan (Laras, 2023).

Digitalisasi proses perolehan sertifikasi guru ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan wajib pengguna Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 4263/Bhk.04.01/2023 Tentang Optimalisasi Komunitas Belajar. Agar dapat memperoleh sertifikasi guru, para guru perlu mengakses modul-modul yang berisi materi-materi berbentuk video dari menu Pelatihan Mandiri yang ada pada Platform Merdeka Mengajar. Setelah menonton materi dari modul-modul peningkatan kompetensi, para guru kemudian menyusun output nyata dalam bentuk desain grafis sebagai hasil dari pembelajaran menggunakan aplikasi/platform *edit* ke dalam PMM. Setelah mengunggah output nyata tersebut, para guru akan memperoleh sertifikasi sesuai kompetensi yang telah dikerjakan melalui aplikasi PMM.

Berdasarkan hasil wawancara dari guru honorer di Kota Jeneponto, sistem dari Platform Merdeka Mengajar mengharuskan guru honorer untuk mengakses Pelatihan Mandiri di PMM dengan menonton 20-30 video peningkatan kompetensi. Hal ini sangatlah menguras kuota internet. Saat ini realitasnya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah maju dan terpencil dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Salah satu wilayah dengan kesenjangan digitalisasi pendidikan yang tinggi adalah Kabupaten Jeneponto yang berada pada peringkat kedua di Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 13% (Darmawan, 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan jaringan yang kurang memadai berdampak bagi para guru, baik yang berstatus ASN maupun honorer di Kabupaten Jeneponto. Jaringan yang baik hanya tersedia di kota sehingga apabila para guru ingin mengakses materi Pelatihan Mandiri, maupun membuat serta mengumpulkan output aksi nyata ke dalam PMM, mereka harus ke kota yang jarak tempuhnya antara 30 menit sampai dengan 1 jam sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit, ditambah permasalahan kualitas jalanan di daerah

tidak sesuai standar.

Output manfaat yang diberikan dari perolehan sertifikasi hanyalah sebatas peningkatan kompetensi dan profesionalisme, para guru honorer tidak dapat menggunakan Sertifikat Pelatihan Mandiri untuk mengembangkan karier mereka. Manfaat pengembangan karier yang ditawarkan oleh sertifikasi guru hanya diperuntukkan bagi para guru yang telah berstatus sebagai PNS. Sertifikasi guru tersebut juga menjanjikan kenaikan gaji hanya kepada para guru PNS. Sedangkan para guru honorer tidak dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk kenaikan gaji dan menunjang karier, khususnya jika ingin mendaftar menjadi calon PPPK dan PNS.

Proses digitalisasi sertifikasi guru yang pada teorinya dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru honorer malah menjadi beban bagi mereka. Bagaimana tidak, proses sertifikasi membutuhkan banyak kuota internet dikarenakan diakses melalui youtube untuk menonton video-video materi kompetensi sedangkan gaji dari guru honorer tidaklah seberapa. Selain itu, jaringan internet yang kurang memadai menyebabkan para guru honorer harus ke daerah kota untuk mendapatkan jaringan kuat, hal ini tentu membutuhkan biaya bahan bakar kendaraan. Segala pengorbanan yang dilakukan para guru honorer dalam mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia tidak dibarengi dengan upaya untuk mensejahterakan para guru honorer itu sendiri.

Pembatasan manfaat atas perolehan sertifikasi guru bagi para guru honorer menunjukkan adanya kesenjangan pada sistem pendidikan Indonesia, terkhusus pada tenaga pendidik. Apalagi diperparah dengan permasalahan guru honorer yang terus meningkat tidak kunjung dapat diatasi oleh pemerintah. Para guru honorer seakan-akan sangat dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam mengajar tetapi dilain sisi, dalam hal peningkatan kesejahteraan pribadi, guru honorer malah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat disayangkan mengingat perlunya ada keseimbangan antara peningkatan kualitas dan kompetensi guru dengan kesejahteraan guru itu sendiri.

Permasalahan ini juga tidak sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan yang mengatur tentang pentingnya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan dan pengembangan profesi guru agar mewujudkan guru yang profesional, berkualitas, dan bermartabat (Inkiriwang, 2020). Karena peningkatan SDM di Indonesia dipengaruhi oleh

kualitas pendidikannya, serta kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari pengajar dan calon pengajar.

2. Skema Kebijakan Pemberdayaan Guru Honorer dalam Meningkatkan Akses CASN di Daerah Miskin di Era Transformasi Digital

Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar tetap (Mighwar dan Nopaulita, 2023). Mereka mengisi kekosongan yang sering kali terjadi di sekolah-sekolah terpencil dan miskin, memungkinkan institusi-institusi ini untuk tetap beroperasi secara efektif. Dedikasi tinggi dan kompetensi yang dimiliki oleh banyak guru honorer berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengajaran yang baik dan motivasi bagi siswa (Hidayati dkk., 2023). Guru honorer juga dikenal karena fleksibilitas dan adaptabilitas mereka terhadap perubahan kurikulum dan metode pengajaran, yang memungkinkan mereka untuk cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekolah dan siswa.

Kehadiran guru honorer mengurangi beban administratif guru tetap, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengajaran dan pengembangan kurikulum (Purbiyati dan Riyanto, 2022). Namun, guru honorer sering kali menghadapi tantangan seperti ketidakpastian status pekerjaan, gaji yang rendah, dan kurangnya akses terhadap pelatihan profesional (Emynorane dkk., 2024), sehingga pemberdayaan dan dukungan terhadap mereka sangat penting untuk memastikan mereka dapat terus memberikan kontribusi maksimal dalam pendidikan.

Sebagai tenaga pengajar yang dipekerjakan dengan status non-PNS atau non-pegawai tetap. Mereka berperan penting dalam mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan miskin (Novita, 2023). Karakteristik guru honorer antara lain adalah fleksibilitas, adaptabilitas, dan dedikasi tinggi meskipun sering kali bekerja tidak sesuai dengan imbalan pekerjaan yang pasti. Pemberdayaan guru honorer dalam konteks pendidikan melibatkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan mereka melalui pelatihan profesional, akses ke sumber daya pendidikan, dan peningkatan status serta gaji. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan guru honorer dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menghadapi tantangan di era transformasi digital (Agustia dkk., 2024).

Perkembangan era transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pendidikan, termasuk bagi guru honorer. Munculnya internet dan platform digital dengan tawaran pengajaran lebih baik, guru honorer kini harus memiliki akses lebih luas terhadap berbagai sumber daya belajar tersebut, seperti materi pelajaran, modul, video pembelajaran, dan alat bantu mengajar lainnya yang tersedia secara online (McHaney, 2023).

Transformasi digital juga memungkinkan guru honorer untuk mengikuti pelatihan dan workshop secara online, memanfaatkan berbagai aplikasi perangkat lunak dan platform *e-learning* untuk membuat proses belajar mengajar menjadi efisien (Lytras, dkk., 2024). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet di daerah terpencil, serta kebutuhan akan literasi digital yang memadai bagi para guru honorer, tetap harus diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar guru honorer dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era transformasi digital.

Kebutuhan pemberdayaan guru honorer di daerah miskin sangatlah mendesak, mengingat mereka memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah yang sering kali kekurangan tenaga pengajar tetap (Fortner, dkk., 2021). Pemberdayaan terhadap guru honorer menjadi sangat penting untuk memastikan mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemberdayaan ini bisa meliputi peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji dan jaminan pekerjaan, penyediaan bantuan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, serta akses yang lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan guru honorer dapat lebih termotivasi dan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam mencerdaskan generasi muda di daerah miskin, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa (Fauzan, dkk., 2023). Kurikulum ini menekankan pada pemberdayaan guru untuk mengembangkan materi ajar yang relevan dan kontekstual, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar.

Salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka adalah fokus pada pembelajaran

berbasis proyek, di mana siswa diajak untuk mengerjakan proyek-proyek nyata yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, inspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia modern, serta membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

PMM (Platform Merdeka Mengajar) adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Dari perspektif negatif, guru honorer mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan PMM karena keterbatasan akses teknologi, kurangnya pelatihan yang memadai, dan ketidakpastian mengenai status pekerjaan mereka. Banyak guru honorer yang bekerja di daerah terpencil dengan infrastruktur teknologi yang minim, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses platform digital yang diperlukan untuk PMM. Selain itu, kurangnya pelatihan yang spesifik tentang penggunaan platform ini dapat membuat mereka merasa tidak siap dan tertekan untuk memenuhi tuntutan yang ada. Ketidakpastian mengenai masa depan mereka sebagai guru honorer juga dapat menambah beban psikologis, di mana mereka merasa bahwa investasi waktu dan usaha untuk beradaptasi dengan PMM mungkin tidak sebanding dengan hasil yang akan mereka peroleh, mengingat status mereka yang tidak tetap. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan partisipasi dalam program-program yang ditawarkan oleh PMM.

Transformasi digital harus didukung oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penerapan Kurikulum Merdeka menggunakan PMM. Peningkatan kompetensi diri melalui Pelatihan Mandiri memanglah positif untuk pengembangan karir guru honorer. Namun sayangnya, problema yang terabaikan seperti kuota internet yang tidak memadai dapat menghambat pengembangan karir mereka di bidang digital.

Penghasilan yang kurang dan tekanan pekerjaan memaksa mereka harus berlangganan paket internet untuk penyesuaian dengan Kurikulum Merdeka. Bantuan kuota internet bagi para pendidik hanya dimasifkan pada saat Pandemi COVID-19 seperti yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data

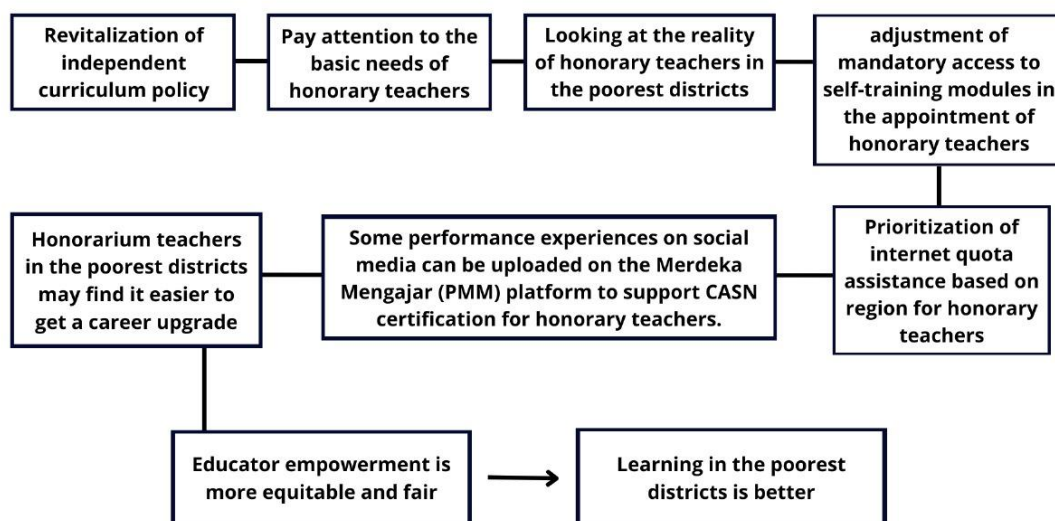
Internet Tahun 2021.¹ Padahal seharusnya, sesuai pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur mengenai penggunaan Dana BOS untuk pembiayaan bantuan internet untuk digitalisasi sekolah. Meskipun telah diatur, sayangnya bantuan kuota internet untuk para pendidik tidak dianggap menjadi prioritas yang utama, sehingga beberapa kebijakan pemerintah mengenai penerapan Kurikulum Merdeka ini harus dilakukan perancangan ulang. Perlu ditinjau kembali bagaimana rancangan skema yang tepat sehingga dapat menjadi solusi bagi guru honorer, khususnya dalam aspek pengembangan karier melalui Pelatihan Mandiri terutama yang berada di daerah dengan persentase penduduk miskin yang banyak. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap guru honorer dalam proses peningkatan karier. Dukungan ini diperlukan untuk kebutuhan mereka dalam pelaksanaan pengajaran, diantaranya yaitu:

a) Pemberian sertifikat untuk pengalaman kinerja di luar sekolah sebagai penunjang kompetensi guru honorer di PMM. Beberapa guru honorer yang memanfaatkan proses pembelajaran di luar sekolah, salah satunya yakni pemanfaatan platform media sosial seperti Youtube, TikTok, Instagram dalam mengedukasi seluruh siswa/i di Indonesia, mereka dapat melampirkan tautan materi pembelajaran tersebut yang ada di media sosial mereka ke PMM, sehingga setelah tautan tersebut diunggah, guru honorer dapat memperoleh sertifikat yang dapat menunjang kompetensi mereka selanjutnya. Sertifikat pengalaman kinerja yang telah dikumpulkan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam mendaftar CASN pengajar, harapannya agar pengabdian guru honorer dalam dunia pendidikan tidaklah sia-sia. (Melakukan percepatan/memberikan hak istimewa dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi CASN).

b) Setiap instansi pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kompetensi guru honorer. Salah satu upayanya adalah penyediaan teknologi yang memadai di setiap sekolah untuk mempermudah guru honorer dalam meningkatkan kompetensi diri. Pemerintah daerah perlu melakukan

pengalokasian dana di setiap sekolah agar merata, menyediakan komputer, jaringan, dan mentor agar metode pengajaran terbaru dan inovatif dalam terealisasi oleh para guru.

c) Meskipun kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam proses pembelajaran. Namun, masih perlu penyesuaian terhadap kondisi lapangan dari guru honorer. Penulis menyadari penting perancangan lebih baik lagi, berikut adalah skema rancangan kebijakan Kurikulum Merdeka terhadap Guru Honorer:



Edited by Irma, Insyirah, Aliya

Gambar 1. Rancangan Kebijakan Kurikulum Merdeka

Pada rancangan tersebut, penting melakukan revitalisasi kebijakan Kurikulum Merdeka untuk menyempurnakan dan memperkuat, pelaksanaan kurikulum ini sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

Kebutuhan mendasar untuk guru honorer menjadi hal krusial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan kualitas dalam mengajar. Kebutuhan tersebut meliputi penghasilan yang layak, jaminan kesejahteraan, status kepegawaian yang jelas, fasilitas dan sarana pendukung kelancaran pendidikan.

Realitas kurangnya perhatian kepada kesejahteraan guru honorer di kabupaten termiskin masih terjadi, pemerintah perlu melakukan pendekatan komprehensif dan sensitif di setiap wilayah. Kesadaran ganda terhadap beban kerja, masih memerlukan langkah konkret seperti penyediaan tunjangan khusus yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis dan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian prioritas dalam program

pengangkatan ASN bagi guru honorer yang telah mengabdikan lama di daerah termiskin, mengingat tantangan dan dedikasi yang telah mereka tunjukkan. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti perumahan guru, transportasi, atau bantuan biaya hidup dapat menjadi solusi untuk meringankan beban guru honorer di daerah-daerah tersebut.

Penyesuaian Kewajiban akses modul pelatihan mandiri, sangat penting dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru honorer sebelum diangkat menjadi ASN. Modul pelatihan mandiri ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang memungkinkan para guru honorer untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan pedagogis, dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional.

Prioritas bantuan kuota internet berdasarkan wilayah, sangat penting untuk diberikan kepada guru honorer. Bantuan kuota internet 60 GB per-bulan selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang jika setelah dievaluasi. Bantuan kuota internet tersebut digunakan dengan baik untuk masing-masing guru honorer di kabupaten termiskin oleh pemerintah daerah, kuota tersebut hanya dapat digunakan dalam mengakses PMM agar dapat dengan lebih mudah menyelesaikan Pelatihan Mandiri tersebut tanpa harus bergantung pada jaringan Wi-fi yang ada di sekolah, sehingga para guru honorer tersebut dapat menyelesaikannya walaupun di rumah.

Pengalaman kinerja di media sosial yang dapat diunggah ke platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk menunjang sertifikasi CASN guru honorer mencakup beberapa aspek penting dalam praktik pengajaran. Dokumentasi aktivitas pembelajaran inovatif yang dibagikan di media sosial, seperti metode pengajaran kreatif, proyek siswa, atau kegiatan pembelajaran interaktif, dapat menjadi bukti kompetensi profesional guru (Bereczki dan Kárpáti, 2021). Unggahan ini dapat berupa foto atau video kegiatan belajar mengajar yang menunjukkan implementasi strategi pembelajaran efektif.

Pemberian insentif finansial bagi guru honorer yang mengikuti pelatihan dan menunjukkan peningkatan kinerja merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini dapat memotivasi guru honorer untuk terus mengembangkan kompetensi mereka sambil membantu meringankan beban ekonomi (Kumar, 2023). Sistem insentif ini dapat dirancang secara bertahap, dimulai dari kehadiran dan partisipasi aktif dalam pelatihan, hingga pencapaian

target-target kinerja yang terukur seperti peningkatan hasil belajar siswa, inovasi dalam metode pengajaran, atau pengembangan media pembelajaran.

Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru honorer merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Program beasiswa ini dapat mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari program sarjana bagi guru honorer yang belum memenuhi kualifikasi minimal, hingga program magister untuk pengembangan keahlian yang lebih mendalam. Beasiswa yang diberikan sebaiknya bersifat komprehensif, meliputi biaya kuliah, tunjangan hidup, dan bantuan penelitian, sehingga guru honorer dapat fokus pada studi tanpa terbebani masalah finansial. Untuk memastikan efektivitas program, perlu dirancang mekanisme seleksi yang adil dan transparan. Kriteria seleksi dapat mempertimbangkan masa pengabdian, prestasi kerja, potensi akademik, dan komitmen untuk terus mengajar setelah menyelesaikan pendidikan. Penting juga untuk memberikan skema ikatan dinas yang proporsional, dimana penerima beasiswa berkomitmen untuk mengajar di daerah asal mereka selama periode tertentu setelah menyelesaikan studi.

Meskipun guru honorer di daerah kabupaten termiskin memiliki tantangan ganda dalam mengembangkan diri, semangat mereka tidak akan pernah padam untuk mengabdikan diri (Santoro, 2021). Penyediaan fasilitas yang memadai dapat menjadi katalisator signifikan dalam peningkatan karier guru honorer di daerah kabupaten termiskin (Darmawan, dkk., 2024). Dengan akses internet yang stabil, guru honorer dapat mengakses berbagai sumber belajar, mengikuti pelatihan online, serta berkolaborasi dengan guru lain di seluruh Indonesia.

Kurikulum baru yang relevan akan mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya (Martinez, 2022). Beasiswa melanjutkan pendidikan memberikan kesempatan bagi guru honorer untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif dan membuka peluang karir yang lebih luas. Dukungan lain, seperti pelatihan pedagogik dan mentoring, akan membantu guru honorer meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Secara keseluruhan, fasilitas yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, tetapi juga membuka jalan bagi guru honorer untuk meraih potensi penuh mereka dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pemberdayaan tenaga pendidik yang merata dan adil merupakan fondasi kuat

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal (Theoharis, 2024). Dengan memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelatihan, dan kesempatan pengembangan diri, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi baik guru maupun siswa. Guru yang kompeten dan termotivasi akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas, sehingga meningkatkan prestasi akademik siswa (Tam, 2021). Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan mempercepat pembangunan daerah. Dengan demikian, investasi dalam pemberdayaan guru adalah investasi masa depan bagi bangsa.

KESIMPULAN

Digitalisasi pendidikan di Indonesia terus berkembang melalui program seperti Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, masih terdapat tantangan signifikan, terutama bagi guru honorer di daerah terpencil seperti Kabupaten Jeneponto, yang menghadapi keterbatasan akses internet, biaya tambahan, dan infrastruktur yang buruk. Selain itu, manfaat sertifikasi pelatihan digital lebih dirasakan oleh guru ASN dibandingkan guru honorer, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pengembangan karier.

Pemberdayaan mereka melalui pelatihan berbasis digital, bantuan kuota internet, insentif finansial, dan program mentoring sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga perlu mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi CASN, dan memastikan kebijakan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara inklusif untuk mendukung pendidikan berkualitas di daerah miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, N. R., Sirozi, M., & Sumarti, S. T. (2024). Analysis Vision Education in Election President 2024 in Indonesia: Urgency, Relevance And Opportunity Implementation from Partner Presidential and Vice Presidential Candidates Number Sequence 01. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2729–2738.
- Antara. (2024, February 19). *Institute of Adult Learning (IAL) di Singapura Pilih ClassIn untuk Meningkatkan “Lifelong Learning” dengan ClassIn Lifelong Learning Ecosystem (LLE)*. Antara News.
- Aryawan, I. W., & Rai, I. B. (2024). Praktik Baik Manajemen Pendidikan di Finlandia untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Widya Accarya*,

- 15(1), 35–41. <https://doi.org/10.46650/wa.15.1.1532.35-41>
- Bereczki, E. O., & Kárpáti, A. (2021). Technology-enhanced creativity: A multiple case study of digital technology-integration expert teachers' beliefs and practices. *Thinking Skills and Creativity*, 39, 100791. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100791>
- Cahya Purnama, S. P. G., & Suyanta, I. W. (2025). Optimalisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) Untuk Mewujudkan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Bangli. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(1), 59–74. <https://doi.org/10.37329/metta.v5i1.3536>
- Darmawan, A. D. (2023, December 19). *13,06% Penduduk di Kab. Jeneponto Masuk Kategori Miskin*. Databoks.
- Darmawan, I. G. N., Suryadi, A., Budimansyah, D., & Susilo. (2024). *Indonesian Education: Past, Present, and Future*. Taylor & Francis.
- Emynorane, R. H., Huda, M., Degeng, I. N. S., Supriyanto, A., & Citriadin, Y. (2024). Challenges and Supports for Enhancing Teacher Professionalism in Private High Schools of Malang: A Qualitative Study. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1606–1615. <http://dx.doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5215>
- Fadya, D. K., Pratiwi, A. R. S., & Muhtarom, T. (2024). *Analisis Perbandingan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Finlandia: Tantangan dan Solusi bagi Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas*. 03(01), 123–130.
- Fauzan, F., Ansori, R. A. M., Dannur, Moh., Pratama, A., & Hairit, A. (2023). The Implementation of the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Strengthening Students' Character in Indonesia. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1), 136–155. <https://doi.org/10.58223/aqlamuna.v1i1.237>
- Fortner, K. M., Lalas, J., & Strikwerda, H. (2021). Embracing Asset-Based School Leadership Dispositions in Advancing True Equity and Academic Achievement for Students Living in Poverty. *Journal of Leadership, Equity, and Research*, 7(1), 1–19.
- Hidayati, D., Kurniawan, A., & Asakir, I. (2023). The Effect Of Teacher Well-Being, Teacher Competency, And Teacher Commitment To Improving School Quality. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v7i1.5595>
- Hidayatullah, M. T., Asbari, M., Ibrahim, M. I., & Faidz, A. H. H. (2023). Urgensi Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia. *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 2(6), 70–73.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*, 8(2), 143–153.
- Isma, C. N., Rina Rahmi, & Hanifuddin Jamin. (2022). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Sekolah. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 129–141. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1317>
- Kamaruddin, N., & Ahmad, L. N. A. (2024). Implementing Technology Leadership

- Competency Standards for School Leaders: Enhancing Educational Quality in the Digital Age. *Online Journal for TVET Practitioners*, 9(2), 140–150. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022). *Apa Itu Pelatihan Mandiri?* Pusat Informasi Guru. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6856401959321-Apa-Itu-Pelatihan-Mandiri>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). *Kemendikbudristek Optimis 1 Juta Guru ASN PPPK Segera Tercapai*. Kemdikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-optimistis-1-juta-guru-asn-pppk-segera-tercapai>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasidatapublikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.
- Kumar, J. (2023). Influence of motivation on teachers' job performance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01662-6>
- Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Laras. (2025, January 19). *Guru Dituntut Adaptasi dengan Digitalisasi Pendidikan*. Natmed.Id (Jaringan Media Siber Indonesia). <https://natmed.id/guru-dituntut-adaptasi-dengan-digitalisasi-pendidikan/>
- Lytra, M. D., Şerban, A. C., Alkhalidi, A., Malik, S., & Aldosemani, T. (2024). *Digital Transformation in Higher Education, Part A: Best Practices and Challenges*. Emerald Publishing.
- Martinez, C. (2022). Developing 21 st century teaching skills: A case study of teaching and learning through project-based curriculum. *Cogent Education*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.2024936>
- McHaney, R. (2023). *The New Digital Shoreline: How Web 2.0 And Millennials Are Revolutionizing Higher Education*. Taylor & Francis.
- Novita, P. (2023). Teaching is (not) a career priority for student teachers: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches*, 3(2), 175–197. <https://doi.org/10.51383/jesma.2023.78>
- Pambudi, G. (2023). Pemahaman Guru Gen Z Terhadap Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Di Tingkat Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 3170–3181.
- Patoni, A. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk*

- Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik di SMK PGRI 2 Kota Jambi.* Universitas Jambi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021.
- Purbiyati, Y. S., & Riyanto, E. A. (2022). The Problem Of Education Fighters' Sense Of Injustice In The Education System In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 314–336. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4731>
- Ryan Gabriel Siringoringo, & Muhamad Yanuar Alfaridzi. (2024). Pengaruh Integrasi Teknologi Pembelajaran terhadap Efektivitas dan Transformasi Paradigma Pendidikan Era Digital. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 66–76. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.854>
- Santoro, D. A. (2021). *Demoralized: Why Teachers Leave The Profession They Love And How They Can Stay*. Harvard Education Press.
- SMP Negeri 1 Kurun. (2023). *Manfaat Sertifikat Pelatihan Mandiri di PMM*. SMP Negeri 1 Kurun. <https://smpnsatukurun.sch.id/read/171/manfaat-sertifikat-pelatihan-mandiri-di-pmm>
- Sugeng. (2024). *Hukum Telematika Indonesia (Revisi)*. Prenada Media.
- Tam, H., Kwok, S. Y. C. L., Hui, A. N. N., Chan, D. K., Leung, C., Leung, J., Lo, H., & Lai, S. (2021). The significance of emotional intelligence to students' learning motivation and academic achievement: A study in Hong Kong with a Confucian heritage. *Children and Youth Services Review*, 121(105847). <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105847>
- Theoharis, G. (2024). *The School Leaders Our Children Deserve: Seven Keys To Equity, Social Justice, And School Reform*. Teachers College Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Universitas PGRI Yogyakarta. (2024). *Dampak Kemajuan Teknologi dalam Pendidikan: Revolusi Belajar di Era Modern*. Universitas PGRI Yogyakarta. <https://upy.ac.id/berita/dampak-kemajuan-teknologi-dalam-pendidikan-revolusi-belajar-di-era-modern/>
- Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2019). *Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia: Tinjauan dampak terkini gerakan Merdeka Belajar*.